

TAX PLANNING

**PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP
PENGUNAAN METODE PENILAIAN PERSEDIAAN PADA
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM UPAYA LEGAL
MEMINIMALKAN PAJAK TERUTANG
(KASUS PADA UD "M" DI MALANG)**

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN DALAM
MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI



DIAJUKAN OLEH

YONATHA SETIYOBUDI

No. Pokok : 040237642

KEPADA

**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2004

SKRIPSI

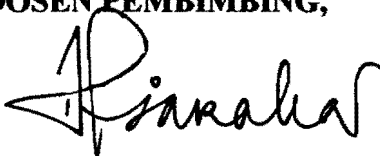
**PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP
PENGUNAAN METODE PENILAIAN PERSEDIAAN PADA
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM UPAYA LEGAL
MEMINIMALKAN PAJAK TERUTANG
(KASUS PADA UD “M” DI MALANG)**

**DIAJUKAN OLEH
YONATHA SETIYOBUDI**

No. Pokok : 040237642

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

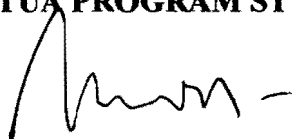
DOSEN PEMBIMBING,



Drs. H. HERU TJARAKA, M.Si., Ak
NIP: 132.054.304

TANGGAL 24-8-2004

KETUA PROGRAM STUDI AKUNTANSI



Drs. M. SUYUNUS, MAFIS, Ak.
NIP: 131.287.542

TANGGAL 24-8-04

ABSTRAK

Peningkatan penerimaan negara agar mampu membiayai pembangunan disegala bidang mendorong pemerintah menerapkan *Self Assestment System*. Sistem tersebut merupakan usaha untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak melalui pemberdayaan masyarakat pembayar pajak. Namun penerapan sistem tersebut menimbulkan masalah yaitu *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan *tax evasion* (penggelapan pajak). Bertolak dari masalah tersebut perusahaan cenderung menerapkan *tax planning* (perencanaan pajak) sebagai upaya legal untuk meminimalkan Pajak Penghasilan (PPH terutang), salah satunya melalui pemilihan metode penilaian persediaan yang dapat menghemat pembayaran pajak namun diperkenankan dalam ketentuan perpajakan. Perencanaan pajak tersebut biasanya diterapkan pada perusahaan dagang dan manufaktur.

Penelitian dilakukan pada UD "M" Malang merupakan perusahaan manufaktur dan perdagangan mebel, sehingga memungkinkan dilakukan pemilihan metode penilaian persediaan. Sesuai dengan ketentuan perpajakan yaitu Undang-undang No. 17 tahun 2000 sebagai perubahan atas Undang-undang No. 6 tahun 1983 mengenai PPh terutama pasal 10 ayat (6) menyebutkan bahwa metode penilaian persediaan yang diperkenankan adalah metode FIFO (*first in first out*) dan metode *Average* (biaya rata-rata).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan karyawan maupun pemilik perusahaan sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur-literatur. Skedul persediaan metode FIFO dan metode biaya rata-rata diolah untuk mendapatkan perhitungan PPh terutang, kemudian hasil perhitungan tersebut dibandingkan sehingga selisih perbandingan tersebut diperlakukan sebagai penghematan pajak.

Hasil penelitian berdasarkan skedul persediaan tahun 2003 menunjukkan bahwa Harga Pokok Penjualan menurut metode biaya rata-rata memberikan hasil yang lebih besar daripada metode FIFO. Perbedaan tersebut juga akan berdampak pada perhitungan laba rugi fiskal yang merupakan dasar untuk menentukan besarnya PPh terutang. Perbedaan atau selisih PPh terutang diantara kedua metode penilaian persediaan tersebut diperlakukan sebagai penghematan pajak. Dari penghitungan PPh terutang menunjukkan bahwa metode biaya rata-rata dapat memberikan penghematan pajak sebesar 7% dibandingkan bila UD "M" menerapkan metode FIFO.

Kata kunci : *tax planning, first in-first out, average, penghematan pajak.*